LITMAPS EDU: Journal Review of Educational Research
https://pusdig.biz.id/index.php/litmapsedu
Volume 1 | Nomor 1 | Juni |2026
e-ISSN: XXXX-XXXX dan p-ISSN: XXXX-XXXX



Ketimpangan Sosial Sebagai Faktor Penghambat Pemerataan Pendidikan di Daerah Terpencil dan Implikasinya terhadap Keuangan Negara

Gebriela Novalita Tatika Putri [1*], Elvira Dwi Prahesti [2], Jenniver Immanuel Muswanto [3], Natazha Putri Nuraini [4], Meirinawati [5], Trenda Aktiva Oktariyanda [6]

[1] Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, 25040674303@mhs.unesa.ac.id
[2] Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, 25040674285@mhs.unesa.ac.id
[3] Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, 25040674295@mhs.unesa.ac.id
[4] Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, 25040674297@mhs.unesa.ac.id
[5] Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, meirinawati@unesa.ac.id
[6] Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, trendaoktariyanda@unesa.ac.id

Article Info

Kata Kunci:
Daerah Terpencil; Ketimpangan Sosial; Keuangan Negara; Pemerataan Pendidikan; Systematic Literature Review

Article History
Received: 2026-05-30
Reviewed: 2026-06-27
Accepted: 2026-06-29

Lisensi: CC-BY-SA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketimpangan sosial sebagai faktor penghambat pemerataan pendidikan di daerah terpencil serta implikasinya terhadap keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, meliputi artikel ilmiah, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen Kementerian Keuangan, serta publikasi terkait ketimpangan pendidikan, daerah terpencil, dan pembiayaan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa disparitas akses pendidikan di daerah terpencil masih terlihat, terutama pada jenjang pendidikan menengah. Ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kondisi ekonomi keluarga, hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur dan sarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta kesenjangan akses teknologi. Dampaknya tidak hanya terlihat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya mobilitas sosial, tetapi juga pada meningkatnya risiko kemiskinan antargenerasi. Dari sisi keuangan negara, ketimpangan pendidikan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan anggaran pendidikan, pembiayaan program afirmasi, bantuan sosial pendidikan, serta potensi inefisiensi alokasi anggaran apabila kebijakan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerataan pendidikan yang lebih terintegrasi melalui pemetaan kebutuhan berbasis wilayah, pemerataan infrastruktur, redistribusi tenaga pendidik, perluasan akses teknologi, dan penguatan pengawasan anggaran pendidikan.

Corresponding Author
Gebriela Novalita Tatika Putri
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia; 25040674303@mhs.unesa.ac.id

How to Cite This Article (APA)
Putri, G. N. T. et al. (2026). Ketimpangan Sosial Sebagai Faktor Penghambat Pemerataan Pendidikan di Daerah Terpencil dan Implikasinya Terhadap Keuangan Negara. *LITMAPS EDU: Journal Review of Educational Research,* 1(1), 71-87. https://doi.org/10.54065/Litmapsedu.1.1.2026.14

1. INTRODUCTION

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa karena berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat stabilitas sosial, serta membentuk masyarakat yang lebih berdaya saing. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memutus rantai

kemiskinan, meningkatkan mobilitas sosial, dan memperluas kesempatan hidup masyarakat (Indrianti et al., 2025). Oleh karena itu, pemerataan akses pendidikan menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional, terutama bagi wilayah yang masih menghadapi keterbatasan geografis, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Namun, dalam praktiknya, pemerataan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di daerah terpencil. Wilayah seperti Kalimantan, terutama daerah pedalaman dan wilayah dengan akses transportasi terbatas, masih menunjukkan adanya kesenjangan layanan pendidikan dibandingkan wilayah perkotaan (Yusuf & Hanif, 2025). Anak-anak di wilayah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap sekolah dengan fasilitas memadai, tenaga pendidik yang relatif cukup, akses teknologi, serta lingkungan belajar yang lebih mendukung. Sebaliknya, anak-anak di daerah terpencil sering menghadapi berbagai hambatan, seperti jarak tempuh sekolah yang jauh, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, kekurangan guru, rendahnya akses internet, serta kondisi ekonomi keluarga yang belum sepenuhnya mendukung keberlanjutan pendidikan (Samhaji & Anggara, 2025).

Ketimpangan sosial menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat hambatan pemerataan pendidikan. Secara umum, ketimpangan sosial dapat dipahami sebagai perbedaan akses, kesempatan, dan sumber daya yang dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat. Dalam konteks pendidikan, ketimpangan sosial tercermin melalui perbedaan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan yang layak, baik dari aspek biaya, lokasi, kualitas sekolah, ketersediaan guru, maupun dukungan fasilitas belajar. Kondisi ini menyebabkan peserta didik dari kelompok masyarakat miskin, pedesaan, dan terpencil memiliki peluang yang lebih kecil untuk memperoleh pendidikan berkualitas dibandingkan peserta didik dari kelompok masyarakat yang lebih mampu dan tinggal di wilayah perkotaan (Azkiyah et al., 2025).

Ketimpangan pendidikan juga memiliki hubungan erat dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Ibourk dan Amaghouss menjelaskan bahwa ketimpangan pendidikan dapat menurunkan produktivitas masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang (Ibourk & Amaghouss, 2013). Pendidikan yang tidak merata berpotensi memperbesar kesenjangan sosial karena kelompok masyarakat miskin dan terpencil tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Akibatnya, rendahnya tingkat pendidikan dapat berdampak pada terbatasnya peluang kerja, rendahnya pendapatan, serta lemahnya kemampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Kondisi tersebut pada akhirnya menciptakan lingkaran ketimpangan yang terus berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pada perspektif keadilan sosial, pemerataan pendidikan seharusnya tidak hanya dilihat dari ketersediaan sekolah, tetapi juga dari kesetaraan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal ini dapat dianalisis melalui Equity Theory atau teori keadilan, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara input yang diberikan individu dengan output yang diterima. Dalam konteks pendidikan di daerah terpencil, masyarakat sering kali harus mengeluarkan usaha, waktu, dan biaya yang lebih besar untuk mengakses pendidikan. Peserta didik di daerah terpencil, misalnya, harus menempuh perjalanan jauh, belajar dalam fasilitas terbatas, dan menghadapi keterbatasan guru atau bahan ajar.

Namun, hasil pendidikan yang diterima sering kali tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan,

menurunkan motivasi belajar, dan memperbesar risiko putus sekolah. Permasalahan ketimpangan pendidikan juga memiliki implikasi terhadap keuangan negara. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang besar untuk mengatasi berbagai kesenjangan pendidikan, seperti pembangunan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, distribusi guru, bantuan pendidikan, penguatan teknologi pembelajaran, serta program afirmasi bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Apabila ketimpangan pendidikan tidak ditangani secara efektif, maka beban fiskal negara dapat meningkat karena rendahnya kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada rendahnya produktivitas, meningkatnya kemiskinan, serta bertambahnya kebutuhan belanja sosial.

Sehingga, ketimpangan pendidikan bukan hanya persoalan sektor pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam mendukung pembangunan manusia yang merata. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan akses pendidikan masih terjadi di wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Kalimantan. Darmawati dan Suhariyanto menyatakan bahwa Kawasan Timur Indonesia, termasuk Pulau Kalimantan, memiliki kesenjangan akses pendidikan yang lebih besar dibandingkan Kawasan Barat Indonesia (Darmawati & Suhariyanto, 2019).

Sementara itu, Provinsi Kalimantan Timur masih mengalami ketimpangan pendidikan pada kategori sedang (Harahap et al., 2020). Kondisi ini menjadi menarik karena di sisi lain Provinsi Kalimantan Timur memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tergolong tinggi (Harahap et al., 2020). BPS Provinsi Kalimantan Timur (2020) mencatat bahwa capaian IPM tersebut menunjukkan kemajuan pembangunan manusia dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Namun, capaian IPM yang tinggi belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil dan pedalaman.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai ketimpangan sosial sebagai faktor penghambat pemerataan pendidikan di daerah terpencil perlu dilakukan secara lebih sistematis. Sejumlah penelitian telah membahas ketimpangan pendidikan, akses pendidikan, dan pembangunan daerah terpencil, tetapi kajian yang secara khusus menghubungkan ketimpangan sosial, pemerataan pendidikan, dan implikasinya terhadap keuangan negara masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, artikel ini disusun dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis temuan-temuan penelitian terdahulu mengenai bentuk ketimpangan sosial dalam pendidikan, faktor penghambat pemerataan pendidikan di daerah terpencil, serta dampaknya terhadap efektivitas kebijakan dan pengelolaan keuangan negara.

Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis literatur yang membahas hubungan antara ketimpangan sosial dan pemerataan pendidikan di daerah terpencil, serta menganalisis implikasinya terhadap keuangan negara. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan studi pendidikan dan kebijakan publik, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan manusia.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasi,

menyeleksi, menganalisis, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu ketimpangan sosial sebagai faktor penghambat pemerataan pendidikan di daerah terpencil serta implikasinya terhadap keuangan negara. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai perkembangan kajian, faktor-faktor penyebab ketimpangan pendidikan, dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, serta arah kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran artikel ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan publikasi akademik yang relevan. Sumber literatur yang digunakan meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen kebijakan pendidikan, serta publikasi yang membahas ketimpangan sosial, akses pendidikan, daerah terpencil, dan keuangan negara. Penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan beberapa kata kunci, antara lain "ketimpangan sosial," "pemerataan pendidikan," "akses pendidikan daerah terpencil," "ketimpangan pendidikan di Kalimantan," "daerah 3T," "keuangan negara," "anggaran pendidikan," dan "educational inequality."

Proses seleksi literatur dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi, yaitu mengumpulkan berbagai artikel dan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Tahap kedua adalah penyaringan, yaitu membaca judul, abstrak, dan kata kunci untuk memastikan kesesuaian literatur dengan fokus kajian. Tahap ketiga adalah penilaian kelayakan, yaitu membaca isi artikel secara lebih mendalam untuk melihat relevansi, kualitas sumber, serta kontribusinya terhadap pembahasan penelitian. Tahap terakhir adalah penetapan literatur yang dianalisis, yaitu memilih artikel dan dokumen yang memenuhi kriteria inklusi untuk digunakan dalam sintesis hasil.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: artikel atau dokumen yang membahas ketimpangan sosial dan pendidikan, akses pendidikan di daerah terpencil atau wilayah 3T, pemerataan pendidikan, kondisi pendidikan di Kalimantan atau wilayah dengan karakteristik serupa, serta implikasi pendidikan terhadap pembangunan ekonomi dan keuangan negara. Literatur yang digunakan diutamakan berasal dari publikasi ilmiah dan sumber resmi yang memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak memiliki keterkaitan dengan pendidikan, tidak membahas aspek ketimpangan sosial atau akses pendidikan, tidak tersedia dalam teks lengkap, serta sumber yang tidak memiliki kejelasan identitas penulis, penerbit, atau tahun publikasi.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, yaitu mengelompokkan temuan literatur ke dalam beberapa tema utama. Tema-tema tersebut meliputi faktor ekonomi, faktor geografis, keterbatasan infrastruktur pendidikan, distribusi tenaga pendidik, kesenjangan akses teknologi, dampak ketimpangan pendidikan terhadap kualitas sumber daya manusia, serta implikasi ketimpangan pendidikan terhadap keuangan negara. Setiap literatur yang telah dipilih dianalisis untuk menemukan pola temuan, persamaan, perbedaan, serta hubungan antarvariabel yang mendukung pemahaman mengenai ketimpangan sosial dan pemerataan pendidikan di daerah terpencil.

Pada metode SLR ini, penelitian tidak hanya menyajikan rangkuman dari berbagai penelitian terdahulu, tetapi juga melakukan sintesis terhadap temuan-temuan utama untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan demikian, hasil kajian

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor dominan yang menghambat pemerataan pendidikan di daerah terpencil, khususnya di wilayah Kalimantan, sekaligus menjelaskan bagaimana ketimpangan pendidikan dapat berimplikasi terhadap efektivitas anggaran pendidikan, beban fiskal negara, dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

3. RESULT AND DISCUSSION

Disparitas Akses Pendidikan Antara Wilayah Perkotaan dan Daerah Terpencil

Disparitas akses pendidikan di daerah terpencil menjadi salah satu temuan utama dalam kajian ini. Berdasarkan hasil telaah literatur, ketimpangan akses pendidikan tidak hanya terlihat dari perbedaan angka partisipasi sekolah antara wilayah perkotaan dan perdesaan, tetapi juga dari perbedaan keberlanjutan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Secara umum, akses pendidikan dasar di Indonesia relatif sudah menjangkau sebagian besar anak usia sekolah. Namun, pada jenjang pendidikan menengah, kesenjangan masih terlihat, terutama pada anak-anak yang tinggal di wilayah terpencil, berasal dari keluarga kurang mampu, atau menghadapi hambatan geografis dan infrastruktur.

Selain itu, disparitas akses pendidikan di daerah terpencil tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan ketersediaan sekolah. Beberapa literatur menunjukkan bahwa akses pendidikan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, jarak tempuh ke sekolah, ketersediaan transportasi, kualitas sarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik, serta dukungan teknologi pembelajaran. Dengan demikian, pemerataan pendidikan di daerah terpencil perlu dilihat secara lebih luas, yaitu sebagai persoalan akses, keberlanjutan pendidikan, dan mutu layanan pendidikan. Temuan-temuan literatur terkait disparitas akses pendidikan di daerah terpencil disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Temuan Literatur tentang Disparitas Akses Pendidikan di Daerah Terpencil

No	Sumber	Fokus Kajian	Temuan Utama	Implikasi terhadap Topik Penelitian
1	Badan Pusat Statistik (BPS)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) berdasarkan kelompok umur dan klasifikasi wilayah	Data BPS menunjukkan bahwa partisipasi sekolah pada usia pendidikan dasar relatif tinggi, tetapi cenderung menurun pada kelompok usia pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar telah lebih merata, sedangkan keberlanjutan pendidikan ke jenjang menengah masih menjadi persoalan, terutama bagi anak-anak di wilayah perdesaan dan daerah terpencil.	Temuan ini menjadi dasar bahwa disparitas akses pendidikan lebih kuat terjadi pada jenjang pendidikan menengah. Daerah terpencil tidak hanya membutuhkan ketersediaan sekolah dasar, tetapi juga dukungan akses menuju pendidikan lanjutan.
2	Ayuningtyas (2021)	Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur	Hasil kajian menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia 7–15 tahun di Kalimantan Timur telah mengakses pendidikan dasar. Namun, masih terdapat ketimpangan kesempatan akses pendidikan menengah pada anak usia 16–18 tahun. Faktor pendidikan kepala keluarga, kondisi ekonomi rumah tangga, dan tempat tinggal berpengaruh terhadap ketimpangan akses pendidikan.	Temuan ini memperkuat bahwa wilayah Kalimantan masih menghadapi persoalan akses pendidikan menengah, terutama bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses.

No	Sumber	Fokus Kajian	Temuan Utama	Implikasi terhadap Topik Penelitian
3	Falah dan Hadna (2022)	Problematika pendidikan di daerah 3T	Kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan di daerah 3T menghadapi berbagai persoalan, seperti belum meratanya sarana dan prasarana publik pendukung pendidikan, keterbatasan akses internet, keterbatasan ekonomi orang tua, minimnya fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga pendidik, serta sulitnya akses jalan dan jarak tempuh sekolah.	Temuan ini menunjukkan bahwa disparitas akses pendidikan di daerah terpencil bersifat multidimensi karena tidak hanya dipengaruhi oleh sekolah, tetapi juga oleh kondisi ekonomi, teknologi, transportasi, dan infrastruktur wilayah.
4	World Bank (2019/2020)	Pendidikan dasar di daerah pedesaan dan terpencil Indonesia	Laporan World Bank menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai partisipasi pendidikan dasar yang tinggi, tetapi kualitas layanan pendidikan dan hasil belajar di wilayah pedesaan dan terpencil masih rendah. Survei pada sekolah dasar pedesaan dan terpencil menemukan adanya hambatan dalam layanan pendidikan, termasuk keterbatasan fasilitas dan tantangan dalam penyelenggaraan pembelajaran.	Temuan ini menegaskan bahwa pemerataan pendidikan tidak cukup dilihat dari angka partisipasi sekolah. Daerah terpencil juga menghadapi ketimpangan mutu layanan pendidikan yang berdampak pada hasil belajar siswa.
5	Muttaqin (2017)	Faktor penentu ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia	Ketimpangan akses pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor pada tingkat individu, rumah tangga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Artinya, ketidakmerataan pendidikan tidak hanya disebabkan oleh kondisi siswa, tetapi juga oleh kualitas sekolah, kemampuan keluarga, lingkungan sosial, serta kebijakan pendidikan.	Temuan ini memperlihatkan bahwa disparitas pendidikan perlu dipahami sebagai persoalan struktural. Pemerataan pendidikan di daerah terpencil membutuhkan intervensi yang menyentuh rumah tangga, sekolah, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.
6	Dalimunthe (2025)	Krisis pendidikan di daerah 3T	Kajian ini membvensahas kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah 3T yang masih menimbulkan persoalan serius dalam pemerataan pendidikan. Wilayah 3T membutuhkan solusi khusus karena menghadapi keterbatasan akses, fasilitas, dan mutu layanan pendidik.	Temuan ini mendukung bahwa daerah terpencil memerlukan kebijakan afirmatif dan strategi pemerataan yang berbeda dari wilayah perkotaan.

Berdasarkan temuan literatur, disparitas akses pendidikan di daerah terpencil paling jelas terlihat pada jenjang pendidikan menengah. Data BPS menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan dasar relatif tinggi, tetapi keberlanjutan pendidikan ke jenjang menengah masih menghadapi hambatan. Temuan Ayuningtyas pada konteks Kalimantan Timur juga menunjukkan pola yang serupa, yaitu akses pendidikan dasar telah lebih merata, tetapi akses pendidikan menengah masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, dan tempat tinggal.

Selain itu, kajian Falah dan Hadna serta World Bank menunjukkan bahwa disparitas pendidikan di daerah terpencil tidak hanya berkaitan dengan angka partisipasi sekolah, tetapi juga menyangkut kualitas layanan pendidikan. Keterbatasan sarana-prasarana, akses jalan, internet, tenaga pendidik, dan fasilitas pembelajaran menyebabkan peserta didik di daerah terpencil tidak memperoleh layanan pendidikan yang setara dengan peserta didik di wilayah perkotaan. Dengan demikian, disparitas akses pendidikan di

daerah terpencil merupakan persoalan multidimensi yang mencakup akses masuk sekolah, keberlanjutan pendidikan, dan mutu layanan pendidikan.

Faktor-Faktor Ketimpangan Sosial yang Menghambat Pemerataan Pendidikan

Berdasarkan hasil telaah literatur, ketimpangan sosial yang menghambat pemerataan pendidikan di daerah terpencil tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan terbentuk dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi keluarga, hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur dan sarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, serta ketimpangan akses teknologi. Kelima faktor tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pemerataan pendidikan di daerah terpencil merupakan persoalan multidimensi yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, wilayah, dan kebijakan pendidikan.

Tabel 2. Temuan Literatur tentang Faktor Ketimpangan Sosial yang Menghambat Pemerataan Pendidikan

No	Faktor Ketimpangan	Sumber	Temuan Utama	Implikasi terhadap Pemerataan Pendidikan
1	Faktor ekonomi keluarga	BPS (2024)	BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 juta orang. Kondisi kemiskinan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pendidikan anak.	Keterbatasan ekonomi keluarga menyebabkan anak-anak di daerah terpencil lebih rentan mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan. Biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan harian dapat menjadi beban tambahan bagi keluarga miskin.
2	Faktor ekonomi keluarga dan latar belakang sosial	Berliana et al. (2024)	Pendidikan di daerah terpencil menghadapi tantangan kompleks, antara lain kekurangan guru berkualitas, tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya latar belakang pendidikan orang tua, ketimpangan antarwilayah, kualitas pengajaran yang tidak merata, dan minimnya fasilitas pendidikan.	Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan rendahnya pendidikan orang tua dapat memperlemah dukungan keluarga terhadap keberlanjutan pendidikan anak, terutama pada jenjang pendidikan menengah.
3	Faktor geografis	Falah dan Hadna (2022)	Kajian tentang pendidikan di daerah 3T menunjukkan bahwa salah satu masalah utama pendidikan adalah sulitnya infrastruktur jalan dan jauhnya jarak tempuh sekolah. Selain itu, wilayah 3T juga menghadapi keterbatasan sarana publik pendukung pendidikan.	Hambatan geografis menyebabkan akses peserta didik ke sekolah menjadi lebih sulit. Jarak yang jauh dan kondisi jalan yang tidak memadai dapat menurunkan kehadiran siswa, meningkatkan risiko putus sekolah, dan menyulitkan distribusi guru.
4	Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendidikan	BPS, *Statistik Pendidikan 2024*	Publikasi Statistik Pendidikan 2024 memuat data tentang jumlah sekolah, ketersediaan dan kondisi ruang kelas, sanitasi sekolah, serta guru pada tingkat nasional dan provinsi. Data ini menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan menjadi indikator penting dalam	Pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah sekolah, tetapi juga dari kelayakan ruang kelas, sanitasi, fasilitas pembelajaran, dan ketersediaan guru. Keterbatasan infrastruktur dapat menurunkan kualitas

No	Faktor Ketimpangan	Sumber	Temuan Utama	Implikasi terhadap Pemerataan Pendidikan
			melihat mutu dan pemerataan layanan pendidikan.	proses belajar mengajar di daerah terpencil.
5	Keterbatasan layanan dasar pendidikan	World Bank (2020)	Studi World Bank pada 270 sekolah dasar pedesaan dan terpencil di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun partisipasi pendidikan dasar sudah tinggi, kualitas layanan pendidikan dan hasil belajar masih rendah. Tantangan yang ditemukan meliputi keterbatasan fasilitas, konektivitas, dan kondisi penyelenggaraan pembelajaran di wilayah pedesaan dan terpencil.	Temuan ini menegaskan bahwa daerah terpencil tidak hanya menghadapi masalah akses masuk sekolah, tetapi juga masalah mutu layanan pendidikan. Siswa dapat bersekolah, tetapi belum tentu memperoleh layanan pendidikan yang setara dengan siswa di wilayah perkotaan.
6	Distribusi tenaga pendidik tidak merata	World Bank (2017)	World Bank menyebutkan bahwa tingginya ketidakhadiran guru menjadi salah satu hambatan dalam peningkatan layanan dan hasil pendidikan di wilayah miskin dan terpencil Indonesia. Survei tahun 2014 menunjukkan bahwa satu dari lima guru tidak hadir di sekolah terpencil.	Ketidakhadiran dan keterbatasan jumlah guru dapat menurunkan efektivitas pembelajaran. Di daerah terpencil, persoalan guru bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kehadiran, pemerataan, kompetensi, dan keberlanjutan penempatan.
7	Distribusi dan profesionalisme guru	Strategi Pemerataan Tenaga Pendidik di Daerah Terpencil (2025)	Kajian ini menyebutkan bahwa pemerataan tenaga pendidik di daerah terpencil merupakan isu strategis dalam pembangunan pendidikan nasional. Ketimpangan distribusi guru berdampak pada rendahnya mutu pembelajaran dan memperlebar kesenjangan antarwilayah.	Pemerataan guru menjadi salah satu prasyarat penting dalam pemerataan pendidikan. Tanpa distribusi guru yang adil, pembangunan infrastruktur sekolah belum tentu mampu meningkatkan kualitas pembelajaran.
8	Ketimpangan akses teknologi	Falah dan Hadna (2022)	Kajian pendidikan di daerah 3T menunjukkan bahwa keterbatasan akses internet dan alat komunikasi menjadi salah satu masalah utama, terutama ketika pembelajaran membutuhkan dukungan teknologi digital.	Keterbatasan akses teknologi menyebabkan peserta didik dan guru di daerah terpencil tertinggal dalam pembelajaran digital. Hal ini memperbesar kesenjangan pendidikan antara wilayah yang memiliki akses internet memadai dan wilayah yang belum terjangkau layanan digital.
9	Faktor multidimensi ketimpangan pendidikan	Muttaqin (2018)	Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai sumber daya pada tingkat individu, rumah tangga, sekolah, komunitas, dan pemerintah. Artinya, persoalan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi siswa, tetapi juga oleh keluarga, sekolah, lingkungan sosial, dan kebijakan negara.	Temuan ini memperkuat bahwa pemerataan pendidikan di daerah terpencil membutuhkan pendekatan lintas sektor. Intervensi tidak cukup hanya melalui sekolah, tetapi juga perlu menyentuh ekonomi keluarga, infrastruktur wilayah, kualitas guru, dan kebijakan anggaran.

Berdasarkan tabel temuan tersebut, faktor ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan pendidikan di daerah terpencil. Keluarga dengan pendapatan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam membiayai kebutuhan pendidikan anak, baik berupa biaya langsung seperti perlengkapan sekolah maupun biaya tidak langsung seperti transportasi. Kondisi ini dapat menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin lebih rentan mengalami keterlambatan sekolah, rendahnya partisipasi pendidikan menengah, bahkan putus sekolah.

Selain faktor ekonomi, hambatan geografis juga menjadi penyebab penting dalam ketimpangan akses pendidikan. Daerah terpencil umumnya memiliki jarak sekolah yang jauh, akses transportasi terbatas, serta kondisi jalan yang belum memadai. Hambatan ini tidak hanya menyulitkan peserta didik untuk bersekolah, tetapi juga menyulitkan distribusi tenaga pendidik dan penyediaan sarana pendidikan. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan di daerah terpencil tidak dapat dilepaskan dari pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah.

Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendidikan juga memperkuat ketimpangan pendidikan. Ketersediaan sekolah, kondisi ruang kelas, sanitasi, fasilitas belajar, listrik, dan akses internet menjadi bagian penting dari mutu layanan pendidikan. Meskipun peserta didik telah memiliki akses masuk sekolah, kualitas pendidikan tetap dapat tertinggal apabila fasilitas belajar tidak memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan harus dilihat dari dua sisi, yaitu akses dan mutu layanan pendidikan.

Distribusi tenaga pendidik yang tidak merata juga menjadi hambatan utama dalam pemerataan pendidikan. Daerah terpencil sering menghadapi keterbatasan jumlah guru, kualitas guru, serta tingkat kehadiran guru. Ketimpangan ini menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan optimal dan berdampak pada rendahnya capaian belajar peserta didik. Dengan demikian, kebijakan pemerataan pendidikan perlu disertai dengan strategi redistribusi guru, peningkatan kompetensi, serta insentif yang memadai bagi tenaga pendidik di daerah terpencil.

Faktor terakhir yang semakin penting adalah ketimpangan akses teknologi atau digital divide. Perkembangan pembelajaran digital belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh peserta didik di daerah terpencil karena masih terbatasnya akses internet, perangkat digital, dan literasi teknologi. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan pendidikan semakin melebar antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Dengan demikian, faktor ekonomi, geografis, infrastruktur, tenaga pendidik, dan teknologi saling berkaitan dalam membentuk ketimpangan sosial yang menghambat pemerataan pendidikan.

Dampak Ketimpangan Pendidikan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mobilitas Sosial

Ketimpangan pendidikan tidak hanya berdampak pada rendahnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan mobilitas sosial. Pendidikan yang tidak merata menyebabkan kelompok masyarakat di daerah terpencil memiliki peluang yang lebih kecil untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Kondisi tersebut dapat memperlemah daya saing tenaga kerja, membatasi peningkatan pendapatan, serta memperbesar risiko terjadinya kemiskinan antargenerasi.

Tabel 3. Temuan Literatur tentang Dampak Ketimpangan Pendidikan terhadap Kualitas SDM dan Mobilitas Sosial

Sumber	Fokus Kajian	Temuan Utama	Implikasi terhadap Topik Penelitian
Muttaqin (2018)	Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia	Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan dipengaruhi oleh sumber daya pada tingkat individu, rumah tangga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Anak dari keluarga miskin lebih rentan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi, latar belakang keluarga, dan kualitas sekolah.	Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan dapat membatasi pembentukan kualitas SDM. Anak-anak dari kelompok miskin dan daerah terpencil memiliki peluang lebih kecil untuk memperoleh pendidikan berkualitas, sehingga keterampilan dan daya saingnya juga lebih rendah.
Ibourk dan Amaghouss (2013)	Ketimpangan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi	Kajian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika pendidikan tidak merata, kemampuan masyarakat untuk berkontribusi terhadap produktivitas ekonomi juga menjadi terbatas.	Temuan ini memperkuat bahwa ketimpangan pendidikan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pembangunan ekonomi. Rendahnya kualitas pendidikan di daerah terpencil dapat menurunkan produktivitas dan memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kawinata et al. (2022)	Peran pendidikan dalam mobilitas pendapatan antargenerasi di Indonesia	Pendidikan berpengaruh terhadap mobilitas pendapatan antargenerasi di Indonesia. Pendidikan anak memiliki peran penting dalam menentukan pendapatan anak pada masa depan, sehingga investasi pendidikan menjadi faktor penting untuk meningkatkan mobilitas sosial.	Temuan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan yang tidak merata dapat memperkuat kemiskinan antargenerasi. Jika anak dari keluarga miskin tidak memperoleh pendidikan yang layak, peluang mereka untuk meningkatkan status ekonomi keluarga menjadi lebih kecil.
World Bank (2020)	Pendidikan, modal manusia, dan pembangunan Indonesia	World Bank menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan sistem pendidikan dan pelatihan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat modal manusia, serta mendukung tujuan ekonomi dan pembangunan nasional.	Temuan ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas SDM. Ketimpangan pendidikan di daerah terpencil dapat menghambat pembentukan modal manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional.
World Bank, *The Promise of Education in Indonesia*	Kesenjangan pembelajaran dan modal manusia	Laporan World Bank menunjukkan bahwa kemiskinan belajar dan ketimpangan pembelajaran di Indonesia masih tinggi. Ketimpangan hasil belajar terjadi antarwilayah, antarsekolah, dan di dalam sekolah, sehingga Indonesia perlu memperkuat kualitas pendidikan untuk mencapai potensi modal manusianya.	Temuan ini memperlihatkan bahwa ketimpangan pendidikan tidak hanya terjadi pada akses masuk sekolah, tetapi juga pada capaian belajar. Rendahnya hasil belajar di daerah tertinggal dapat berdampak pada rendahnya kemampuan kerja dan kualitas SDM.

Berdasarkan temuan literatur, dampak utama ketimpangan pendidikan terlihat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Peserta didik di daerah terpencil yang

memiliki akses terbatas terhadap pendidikan bermutu cenderung menghadapi keterbatasan dalam penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Ketimpangan ini menyebabkan daya saing tenaga kerja dari daerah terpencil menjadi lebih rendah dibandingkan masyarakat yang memperoleh akses pendidikan lebih baik.

Ketimpangan pendidikan juga berdampak pada mobilitas sosial masyarakat. Pendidikan yang rendah membatasi peluang individu untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan pendapatan yang lebih tinggi. Akibatnya, masyarakat dari keluarga miskin atau daerah terpencil lebih sulit meningkatkan status sosial-ekonominya. Kondisi ini dapat memperkuat kemiskinan antargenerasi, yaitu ketika keterbatasan pendidikan orang tua berulang pada anak karena rendahnya kemampuan keluarga dalam menyediakan dukungan pendidikan. Selain itu, ketimpangan pendidikan berpengaruh terhadap pembangunan manusia secara lebih luas. Pendidikan yang tidak merata menyebabkan pembentukan modal manusia menjadi tidak optimal. Daerah terpencil yang menghadapi keterbatasan akses, mutu pembelajaran, dan fasilitas pendidikan akan lebih sulit menghasilkan sumber daya manusia yang produktif dan kompetitif. Dengan demikian, ketimpangan pendidikan bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kemampuan daerah dan negara dalam meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi Ketimpangan Pendidikan terhadap Keuangan Negara

Ketimpangan pendidikan tidak hanya berdampak pada akses dan mutu pendidikan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap keuangan negara. Ketimpangan yang terjadi di daerah terpencil menuntut pemerintah untuk menyediakan alokasi anggaran yang lebih besar guna membiayai pembangunan infrastruktur pendidikan, bantuan operasional sekolah, bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu, insentif tenaga pendidik, serta program afirmasi bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dengan demikian, ketimpangan pendidikan dapat menambah beban fiskal negara apabila kebijakan pemerataan tidak berjalan efektif dan tepat sasaran.

Tabel 4. *Ketimpangan Pendidikan terhadap Keuangan Negara*

Aspek Implikasi	Literatur/ Sumber	Temuan Utama	Makna terhadap Keuangan Negara
Peningkatan kebutuhan anggaran pendidikan	Kementerian Keuangan RI dan Sekretariat Kabinet RI	Anggaran pendidikan terus meningkat, yaitu Rp608,3 triliun pada tahun 2023, Rp665 triliun pada tahun 2024, dan direncanakan sebesar Rp757,8 triliun pada tahun 2026. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM, bantuan pendidikan, operasional sekolah, dan pemerataan layanan pendidikan.	Peningkatan anggaran menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan membutuhkan dukungan fiskal yang besar. Ketimpangan pendidikan membuat negara harus terus mengalokasikan dana untuk menutup kesenjangan akses, sarana, dan kualitas layanan pendidikan.
Beban mandatory spending pendidikan	Kementerian Keuangan RI	Anggaran pendidikan merupakan mandatory spending yang dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Mandatory spending bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, termasuk melalui pemenuhan layanan pendidikan.	Ketimpangan pendidikan membuat belanja pendidikan menjadi kebutuhan fiskal yang terus berulang. Negara tidak hanya membiayai peningkatan mutu, tetapi juga harus membiayai pemerataan layanan dasar pendidikan di daerah terpencil.

Aspek Implikasi	Literatur/ Sumber	Temuan Utama	Makna terhadap Keuangan Negara
Pembiayaan program afirmasi pendidikan	Kementerian Keuangan RI	Anggaran pendidikan digunakan untuk berbagai program afirmasi, seperti Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, BOS, BOP PAUD, tunjangan profesi guru, serta pembangunan dan rehabilitasi sekolah.	Ketimpangan sosial dan ekonomi masyarakat menyebabkan negara perlu menyediakan bantuan pendidikan agar kelompok miskin dan rentan tetap dapat mengakses pendidikan. Hal ini menambah kebutuhan belanja negara pada sektor pendidikan.
Inefisiensi alokasi anggaran	Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan	Kajian BKF menunjukkan bahwa peningkatan cakupan dan alokasi bantuan sosial belum selalu berkontribusi optimal terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Dalam program PIP, masih ditemukan anak usia sekolah dari keluarga penerima manfaat PKH yang belum menerima PIP, serta kendala pencairan bantuan karena akses layanan keuangan dan administrasi.	Ketimpangan pendidikan dapat menyebabkan anggaran tidak bekerja optimal apabila program belum tepat sasaran atau masih menghadapi kendala pelaksanaan. Masalah utama bukan hanya besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas distribusi dan pengawasan program.
Penurunan kualitas SDM dan produktivitas nasional	World Bank	World Bank menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan sistem pendidikan dan pelatihan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat modal manusia, serta mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan. World Bank juga menegaskan bahwa bersekolah tidak selalu sama dengan belajar; capaian belajar akan berdampak langsung pada produktivitas ketika seseorang dewasa.	Ketimpangan pendidikan dapat melemahkan kualitas modal manusia. Dalam jangka panjang, rendahnya kualitas SDM dapat menurunkan produktivitas nasional dan memperkecil kontribusi masyarakat terhadap penerimaan negara.
Hambatan pertumbuhan ekonomi	Ibourk dan Amaghouss (2013)	Penelitian Ibourk dan Amaghouss menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa indeks ketimpangan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada beberapa kelompok negara yang dikaji.	Ketimpangan pendidikan bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga persoalan ekonomi dan fiskal. Rendahnya pemerataan pendidikan dapat menurunkan produktivitas masyarakat dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan negara dalam memperkuat basis penerimaan.
Peningkatan kebutuhan belanja sosial	Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, kajian BKF menunjukkan masih terdapat kendala dalam efektivitas bantuan, termasuk aspek ketepatan sasaran, kecukupan bantuan, dan akses layanan.	Ketimpangan pendidikan dapat memperbesar beban fiskal negara karena masyarakat dengan pendidikan rendah lebih rentan terhadap kemiskinan dan membutuhkan dukungan sosial secara berkelanjutan.

Berdasarkan tabel tersebut, implikasi ketimpangan pendidikan terhadap keuangan negara dapat dilihat dari meningkatnya kebutuhan anggaran pendidikan. Pemerintah

terus mengalokasikan anggaran pendidikan dalam jumlah besar, yaitu Rp608,3 triliun pada tahun 2023, Rp665 triliun pada tahun 2024, dan direncanakan sebesar Rp757,8 triliun pada tahun 2026. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi prioritas fiskal negara, sekaligus memperlihatkan besarnya kebutuhan pembiayaan untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas layanan, dan mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah.

Ketimpangan pendidikan juga berhubungan dengan mandatory spending pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN dan APBD. Alokasi wajib tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan pendidikan. Namun, dalam konteks daerah terpencil, anggaran pendidikan tidak hanya digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, tetapi juga untuk menutup kesenjangan dasar, seperti pembangunan dan rehabilitasi sekolah, bantuan operasional, bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu, serta dukungan bagi tenaga pendidik.

Selain menambah kebutuhan anggaran, ketimpangan pendidikan juga dapat menimbulkan inefisiensi alokasi apabila program tidak tepat sasaran atau tidak didukung pelaksanaan yang efektif. Bantuan pendidikan seperti PIP, BOS, dan program afirmasi lainnya akan kurang optimal apabila masih terdapat kendala distribusi, keterbatasan akses layanan keuangan, lemahnya pengawasan, serta belum terpadunya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, persoalan keuangan negara tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran, tetapi juga dengan efektivitas penggunaan anggaran.

Jangka panjang, ketimpangan pendidikan berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas nasional. Pendidikan yang tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil, tidak memperoleh keterampilan dan kompetensi yang memadai untuk masuk ke pasar kerja formal. Rendahnya kualitas SDM dapat menurunkan produktivitas, memperkecil kontribusi ekonomi masyarakat, dan meningkatkan ketergantungan terhadap bantuan sosial. Dengan demikian, ketimpangan pendidikan berimplikasi terhadap keuangan negara melalui tiga aspek utama, yaitu meningkatnya kebutuhan anggaran pendidikan, potensi inefisiensi alokasi, dan meningkatnya beban fiskal akibat rendahnya kualitas SDM.

Inefisiensi Anggaran dan Arah Penguatan Kebijakan

Selain berdampak pada meningkatnya kebutuhan anggaran pendidikan, ketimpangan pendidikan juga berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Inefisiensi tersebut terjadi ketika alokasi anggaran pendidikan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil di daerah terpencil. Pembangunan sarana pendidikan, misalnya, tidak selalu diikuti dengan ketersediaan tenaga pendidik yang memadai, akses transportasi yang layak, fasilitas pembelajaran yang cukup, serta dukungan teknologi yang merata. Akibatnya, anggaran yang telah dialokasikan belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan layanan pendidikan secara optimal.

Berbagai program pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), pembangunan dan rehabilitasi sekolah, serta pemberian tunjangan bagi tenaga pendidik telah menjadi instrumen penting dalam mendukung pemerataan pendidikan. Namun, efektivitas program tersebut masih sangat bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, pengawasan, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Apabila distribusi bantuan pendidikan belum menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, maka

anggaran pendidikan berpotensi belum memberikan dampak maksimal terhadap pengurangan ketimpangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pembiayaan pendidikan tidak hanya terletak pada besarnya anggaran, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan dan distribusinya. Ketimpangan pendidikan di daerah terpencil membutuhkan kebijakan yang lebih terintegrasi, yaitu kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan sekolah, tetapi juga memperhatikan pemerataan guru, perbaikan akses transportasi, ketersediaan sarana pembelajaran, jaringan internet, serta kemampuan ekonomi keluarga peserta didik. Dengan demikian, kebijakan pendidikan perlu dirancang secara lintas sektor agar mampu menjawab akar ketimpangan sosial yang menghambat pemerataan pendidikan.

Arah penguatan kebijakan dapat dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain pemetaan kebutuhan pendidikan berbasis wilayah, redistribusi tenaga pendidik berdasarkan kondisi daerah, peningkatan insentif bagi guru di daerah terpencil, penguatan pengawasan program bantuan pendidikan, serta perluasan akses teknologi pembelajaran. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi APBN pendidikan tidak hanya memenuhi ketentuan mandatory spending, tetapi juga benar-benar diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan.

Dengan demikian, inefisiensi anggaran dan arah penguatan kebijakan menjadi bagian penting dalam pembahasan ketimpangan pendidikan dan keuangan negara. Ketimpangan pendidikan tidak cukup diselesaikan dengan peningkatan anggaran semata, tetapi membutuhkan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, terukur, dan berbasis kebutuhan daerah. Apabila kebijakan pendidikan mampu diarahkan secara lebih efektif, maka anggaran negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mempercepat pemerataan pembangunan manusia.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian Systematic Literature Review (SLR), ketimpangan sosial terbukti menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pemerataan pendidikan di daerah terpencil. Ketimpangan tersebut terlihat pada disparitas akses pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan menengah, serta dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kondisi ekonomi keluarga, hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur dan sarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta ketimpangan akses teknologi. Kondisi ini menyebabkan peserta didik di daerah terpencil memiliki peluang yang lebih kecil untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu dibandingkan peserta didik di wilayah perkotaan. Ketimpangan pendidikan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya keterampilan kerja, lemahnya daya saing tenaga kerja, serta terhambatnya mobilitas sosial masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat kemiskinan antargenerasi karena masyarakat dengan akses pendidikan terbatas cenderung memiliki peluang ekonomi yang lebih rendah. Selain berdampak secara sosial, ketimpangan pendidikan juga berimplikasi terhadap keuangan negara, terutama melalui meningkatnya kebutuhan anggaran pendidikan, pembiayaan program afirmasi, bantuan sosial pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta potensi inefisiensi alokasi anggaran apabila program tidak tepat sasaran.

Keterbatasan kajian ini terletak pada penggunaan data sekunder dan literatur yang telah tersedia, sehingga hasil pembahasan bergantung pada kelengkapan dan relevansi sumber yang dianalisis. Selain itu, kajian ini belum melakukan pengujian empiris langsung di daerah terpencil, sehingga belum dapat menggambarkan secara rinci kondisi spesifik setiap wilayah, terutama perbedaan antardaerah di Kalimantan maupun wilayah 3T lainnya. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah perlu memperkuat kebijakan pemerataan pendidikan secara terintegrasi melalui pemetaan kebutuhan pendidikan berbasis wilayah, pemerataan pembangunan infrastruktur, redistribusi dan pemberian insentif bagi tenaga pendidik di daerah terpencil, perluasan akses teknologi pembelajaran, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan. Dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran, anggaran pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mempercepat pemerataan pembangunan manusia.

5. ACKNOWLEDGMENT

-

6. REFERENCES

Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 6*(2), 117–129. https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i2.2128

Azkiyah, S. R., Aryola, G., & Lukitoaji, B. D. (2025). Isu kesenjangan pendidikan di daerah terpencil: Solusi untuk mewujudkan pendidikan yang merata. *Sosiola Pedagogi: Jurnal Inovasi Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, 1(1).*

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peran kebijakan fiskal pada produktivitas, kemiskinan, dan ketimpangan ditinjau dari efektivitas subsidi, bantuan sosial, dan perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Ringkasan kajian spending bantuan sosial*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase penduduk miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik pendidikan 2024*.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut provinsi dan kelompok umur*.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk umur 7–18 tahun menurut klasifikasi desa, jenis kelamin, dan kelompok umur, 2009–2025*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur 2020 sebesar 76,24, turun 0,37 poin dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur 2020*.

Berliana, R. A., Hamidah, N. I. F., & Jasmi, R. A. (2024). Tantangan dan solusi pendidikan di daerah terpencil: Studi kasus di Desa Cisampang. *Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis, 4*(2), 109–118.

Dalimunthe, S. M., Rambe, M. H., & Dwinta, N. (2025). Solusi krisis pendidikan di daerah 3T: Pendekatan dan inovasi untuk kemajuan. *El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 8*(1), 1–20. https://doi.org/10.54125/elbanar.v8i1.503

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Apakah yang disebut dengan mandatory spending?*

Falah, A. I., & Hadna, A. H. (2022). Problematika pendidikan masa pandemi di Indonesia pada daerah 3-T (terluar, tertinggal, dan terdepan). *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 7*(2), 164–185. https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i2.2997

Ibourk, A., & Amaghouss, J. (2013). Inequality in education and economic growth: Empirical investigation and foundations—Evidence from MENA region. *International Journal of Economics and Finance, 5*(2), 111–124. https://doi.org/10.5539/ijef.v5n2p111

Indriaty, D., Astriani, D., Sabrifha, E., & Aqilla, L. (2025). Strategi kebijakan pendidikan dalam menghadapi ketimpangan sosial dan budaya. *PEMA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2),* 551-565. https://doi.org/10.56832/pema.v5i2.1258

Kawinata, M., Yudhistira, M. H., & Pratomo, D. S. (2022). Assessing the role of education on intergenerational income mobility: Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia, 11*(3), 247–264.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp608,3 triliun*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN 2024: Optimalisasi belanja negara untuk mendorong transformasi ekonomi di tengah tantangan global*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun, naik 9,8% dari outlook 2025*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Efisiensi anggaran tetap menjaga alokasi 20% anggaran pendidikan dalam APBN 2025*.

Mamu, N. L., Yanto, A., & Kurniawan, D. (2026). Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan inklusif di daerah terpencil Kabupaten Kupang. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 11(10),* 851–860.

Marziana, L., Suhardi, M., Rohmawati, W., Sakira, N., & Hidayat, A. (2025). Strategi pemerataan tenaga pendidik di daerah terpencil: Sebuah kajian literatur tentang pendekatan yang efektif. *Educational: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran, 5*(2), 473–485. https://doi.org/10.51878/educational.v5i2.6291

Muttaqin, T. (2018). Determinants of unequal access to and quality of education in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 2*(1), 1–23. https://doi.org/10.36574/jpp.v2i1.27

Rifka, R., Pello, M. H., & Heatubun, Y. J. (2026). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Melalui Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Mimik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *3*(8), 1-10.

Samhaji, S., & Anggara, F. D. (2025). Analisis implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan pada daerah tertinggal Indonesia. *Journal of Governance and Policy Innovation, 5(2),* 99-112. https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i2.839

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). *Pemerintah alokasikan anggaran pendidikan Rp608,3 triliun tahun 2023*.

Sugihyono. (2024). Mengatasi ketimpangan: Pembelajaran dari praktik global untuk pendidikan di wilayah terpencil Indonesia. *Journal on Education, 6(2).*

Yusuf, A., & Hanif, M. (2025). Dampak desentralisasi pendidikan terhadap ketimpangan akses di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia,* 153-166. https://doi.org/10.31004/mnhraz85

World Bank. (2017). *Improving education quality in Indonesia's poor rural and remote areas*.

World Bank. (2019). *Primary education in remote Indonesia: Survey results from West Kalimantan and East Nusa Tenggara*. World Bank. https://doi.org/10.1596/33113

World Bank. (2020). *The promise of education in Indonesia*. World Bank.

World Bank. (2020, February 4). *The hard truth: Challenges of primary education in rural and remote Indonesia*. World Bank Blogs.